

DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP KEANGGOTAAN TIMOR LESTE DI ASEAN

7

Rizki Roza

Abstrak

Presiden Timor Leste melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR RI. Berbagai isu dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain dukungan Indonesia terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Menerima permohonan pada tahun 2011, hingga saat ini ASEAN belum memutuskan untuk menerima secara resmi Timor Leste sebagai anggota. Transformasi yang sedang dijalankan ASEAN pasca-diadopsinya Piagam ASEAN menyebabkan organisasi ini lebih berhati-hati dalam memutuskan perluasan keanggotaan. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan kondisi perekonomian Timor Leste dikhawatirkan akan menjadi penghambat percepatan pembangunan ekonomi yang sedang diupayakan ASEAN. Pelambatan transformasi ASEAN dikhawatirkan akan melemahkan peran sentral ASEAN di kawasan. Kondisi ini harus direspons dengan tepat oleh Indonesia yang telah berkomitmen memberikan dukungan. Indonesia, baik pemerintah maupun DPR, perlu memastikan dukungan yang diberikan tidak berpotensi melemahkan peran sentral ASEAN, melainkan memacu kesiapan dan kelayakan Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN.

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo pada akhir Juni 2018 menerima kunjungan Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Francisco Guterres Lu Olo, di Istana Kepresidenan Bogor. Presiden Guterres juga melakukan kunjungan ke DPR. Dalam pertemuan-pertemuan itu, berbagai hal dibahas oleh para pemimpin kedua bangsa, seperti mengenai batas wilayah antara kedua negara dan upaya peningkatan kerja sama di sejumlah bidang. Salah satu hal menarik yang

disampaikan Presiden Guterres dalam kunjungannya adalah terkait pencalonan keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Guterres menyampaikan terima kasih atas dukungan dan usaha Indonesia agar Timor Leste dapat menjadi anggota ASEAN.

Hal ini menarik untuk dikaji kembali mengingat keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN sudah dimulai sejak awal berdiri menjadi negara berdaulat, dan Indonesia merupakan negara pertama yang menyatakan dukungan saat



Timor Leste mengajukan permohonan secara resmi ke ASEAN pada tahun 2011. Kenyataannya, hingga saat ini ASEAN belum memberi kepastian kapan Timor Leste dapat diterima sebagai anggota. Mengapa proses pencalonan keanggotaan Timor Leste harus melewati proses panjang? Apa arti penting dukungan Indonesia? Bagaimana bentuk dukungan yang perlu Indonesia berikan? Tulisan singkat ini akan mencoba menjelaskan persoalan itu dengan terlebih dahulu menguraikan apa persyaratan yang harus dipenuhi Timor Leste untuk dapat diterima menjadi anggota ASEAN.

Perluasan Keanggotaan ASEAN

Berdiri pada tahun 1967, ASEAN merupakan asosiasi yang terbuka untuk negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara selama negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama terhadap tujuan pembentukan kerja sama ASEAN. Meskipun ASEAN tidak mensyaratkan kondisi tertentu terkait ekonomi, politik, sistem ideologis, orientasi maupun tingkat pembangunan suatu negara untuk menjadi anggota ASEAN, namun, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Bangkok, setiap calon anggota harus menerima atau menjadi bagian dari seluruh perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan di ASEAN, dan tentunya secara geografis merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara. Negara calon anggota hanya diharuskan untuk berperan sebagai *observer* atau negara pengamat sebelum secara resmi diangkat menjadi anggota, dengan tujuan agar mengetahui mekanisme dan prinsip-prinsip yang dijalankan ASEAN. Selanjutnya keanggotaan akan dibahas dan disepakati secara konsensus dalam Konferensi Tingkat

Tinggi (KTT) dan diresmikan melalui upacara penerimaan khusus. Proses yang cukup longgar ini memungkinkan keanggotaan ASEAN berkembang cukup cepat. ASEAN yang awalnya hanya beranggotakan lima negara pendiri mulai menerima anggota baru pada tahun 1984, yaitu Brunei Darussalam sebagai anggota ke-6, disusul oleh Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, serta Kamboja pada 1999. Jadi, perluasan keanggotaan bukan merupakan hal baru bagi ASEAN.

Perkembangan lingkungan strategis regional dan internasional mendesak ASEAN untuk membenahi diri dan melakukan perubahan demi penguatan menghadapi tantangan masa depan. Dengan diadopsinya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) pada tahun 2008, ASEAN bertransformasi dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat, dengan aturan yang jelas, serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Transformasi ASEAN juga mempengaruhi bagaimana mekanisme ASEAN menerima anggota baru.

Berbeda dengan perluasan keanggotaan sebelumnya yang tampak lebih longgar, Timor Leste harus menghadapi persyaratan keanggotaan yang telah diatur dalam Piagam ASEAN. Meskipun telah memenuhi kriteria-kriteria umum seperti secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara dan sepakat untuk tunduk pada Piagam, Timor Leste harus melewati prosedur lain yang sebelumnya tidak ada dalam Deklarasi Bangkok. Pasal 6 Piagam ASEAN menyatakan bahwa prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN. Dan berdasarkan ketentuan tersebut, untuk

merespons permohonan Timor Leste, telah dibentuk ASEAN *Coordinating Council Working Group* (ACCWG) pada KTT ASEAN ke-20 untuk mengkaji kesiapan keanggotaan Timor Leste.

ACCWG dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan sejumlah pertemuan untuk membahas perkembangan kajian implikasi keanggotaan Timor Leste di ASEAN dan membahas modalitas serta kegiatan yang dapat diikuti Timor Leste, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas. Ketiga pilar Komunitas ASEAN menjadi acuan dasar kajian ACCWG, yaitu pilar Sosial Budaya, Politik dan Keamanan, dan Ekonomi. Pengkajian ini yang menyebabkan proses penerimaan Timor Leste tampak lebih kompleks dibanding proses perluasan keanggotaan ASEAN yang sudah pernah terjadi sebelumnya.

Implikasi Keanggotaan Timor Leste

Timor Leste telah mengajukan aplikasi untuk menjadi Anggota ASEAN sejak 4 Maret 2011. Sampai dengan KTT ke 31 di Manila, Filipina pada November 2017, ASEAN masih belum memutuskan menerima keanggotaan Timor Leste. Dalam *Chairman's Statement* disampaikan bahwa permohonan keanggotaan Timor Leste masih dalam kajian pejabat-pejabat senior ASEAN. Mengapa proses perluasan keanggotaan ASEAN tampak semakin hati-hati? Apa implikasi dari keanggotaan Timor Leste terhadap organisasi regional ini?

Pengkajian permohonan untuk menjadi anggota ASEAN dilakukan Timor Leste saat Ketua ASEAN dijabat oleh Indonesia. Keinginan Timor Leste ini mendapat sambutan cukup positif dari sejumlah anggota ASEAN. Indonesia merupakan

negara pertama yang menyetujui untuk menerima Timor Leste ke dalam keanggotaan ASEAN, bahkan Indonesia mendorong negara anggota lainnya untuk menyetujui hal ini. Negara anggota ASEAN lainnya yang ikut menyetujui antara lain Malaysia, Thailand, dan Filipina, sementara masih terdapat keraguan dari sebagian negara anggota lainnya yang mengkhawatirkan masa lalu dan stabilitas negara kecil yang baru merdeka pada tahun 2002 tersebut. Dalam perkembangannya, Singapura menjadi negara yang paling keras mengkritisi kesiapan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN.

Meningkatnya arti penting kawasan Asia Tenggara dan peran sentral ASEAN di kawasan telah mendorong banyak negara untuk meningkatkan status kerja samanya dengan organisasi regional ini dan melibatkan diri dalam forum-forum kerja sama multilateral yang diinisiasi oleh ASEAN. Selain Timor Leste, sejumlah negara lainnya di sekitar kawasan Asia Tenggara pernah mengungkapkan keinginannya untuk menjadi anggota, seperti Papua Nugini, Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan, meskipun secara geografis mereka tidak berada di Asia Tenggara. Sejumlah negara besar juga telah mengadopsi sebagian prinsip-prinsip kerja sama ASEAN agar dapat meningkatkan kerja sama di Asia Tenggara.

Penguatan peran sentral ASEAN ini tidak terlepas dari transformasi yang dijalankan ASEAN, terutama sejak diadopsinya Piagam ASEAN. Hal ini pula yang mempengaruhi pertimbangan ASEAN dalam memperluas keanggotaannya, terutama sikap kritis Singapura dalam merespons pencalonan keanggotaan Timor Leste. Sikap kritis juga

muncul dari kalangan akademisi dan organisasi nonpemerintah. Kelompok ini mengkhawatirkan ASEAN akan menghadapi beban berat apabila keanggotaan Timor Leste harus diputuskan segera.

Untuk mewujudkan Komunitas ASEAN sebagaimana cita-cita Piagam ASEAN, organisasi ini harus melakukan berbagai transformasi pada tiga pilar utamanya. ASEAN pun melakukan kajian dengan merujuk pada ketiga pilar tersebut untuk memastikan kelayakan Timor Leste menjadi anggota ASEAN. ASEAN telah memiliki *road map* untuk membangun ketiga pilar itu dan menetapkan negara penanggung jawab untuk masing-masing pilar. Posisi Singapura sebagai penanggung jawab pilar ekonomi merupakan faktor penting yang menghambat diterimanya Timor Leste sebagai anggota. Dengan keanggotaan ASEAN saat ini, ketimpangan antar-anggota sudah cukup besar dan menjadi beban organisasi untuk membangun pilar ekonomi.

Singapura melihat keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Timor Leste harus dipertimbangkan dengan matang sebelum menerima Timor Leste sebagai anggota. Singapura khawatir keterbatasan Timor Leste akan mengganggu percepatan peningkatan produktivitas. Timor Leste juga dikhawatirkan belum siap dengan segala dinamika yang ada di ASEAN. ASEAN juga mempunyai berbagai pertemuan yang harus dihadiri yang berkonsekuensi "*share-cost*" yang harus ditanggung masing-masing anggota. Dikhawatirkan Timor Leste akan terbebani dengan persoalan semacam ini.

ASEAN sendiri dalam menjalankan transformasinya dinilai sebagian pihak berlangsung lambat.

Selain keragaman yang dimiliki anggotanya, ketimpangan juga merupakan faktor yang menjadi penyebab kelambanan ini. Jika kondisi ini tidak dibenahi, bukan tidak mungkin akan melemahkan peran sentral ASEAN. Kondisi ini pula yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan perluasan keanggotaan. Perluasan ASEAN dapat memperbesar pengaruh organisasi dalam pergaulan internasional, tetapi di sisi lain jika anggota baru menjadi beban yang menghambat percepatan penguatan organisasi dikhawatirkan akan memperbesar keraguan masyarakat internasional atas peran sentral ASEAN di kawasan. Implikasi ini yang dikhawatirkan timbul jika ASEAN terburu-buru menerima Timor Leste sebagai anggota.

Dukungan Penguatan bagi Timor Leste

Dukungan Indonesia terhadap upaya Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN memiliki arti penting bagi keberhasilan dan kemajuan Timor Leste. Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Indonesia telah menegaskan dukungannya, demikian pula dengan DPR. Pimpinan DPR saat menerima kunjungan Guterres ke DPR kembali menegaskan bahwa Indonesia akan mendukung penuh pencalonan Timor Leste dalam keanggotaan ASEAN. Dukungan dari Indonesia yang memiliki latar belakang sejarah cukup panjang dengan Timor Leste, jelas mempengaruhi sikap negara anggota ASEAN lainnya.

Bagi Timor Leste, bergabung dengan ASEAN akan membantu mereka memacu pertumbuhan ekonomi, terlebih dengan adanya Pilar Ekonomi Komunitas ASEAN yang mendorong pasar dan basis produksi

tunggal, mengupayakan kawasan dengan perekonomian yang kompetitif dengan melakukan liberalisasi ekonomi, perdagangan, dan jasa. Jika diterima sebagai anggota ASEAN, Timor Leste akan segera menikmati akses terhadap perdagangan bebas ASEAN. Menjadi anggota ASEAN juga akan mendongkrak kekuatan tawar Timor Leste dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara besar.

Bagi Indonesia sebagai negara yang telah berkomitmen untuk memberikan dukungan, keberhasilan Timor Leste diterima sebagai anggota ASEAN akan menjadi ujian apakah Indonesia dapat menjadi negara mitra yang dapat diandalkan oleh Timor Leste. Sejauh ini, hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste berkembang dengan baik, dan kerja sama di berbagai bidang juga terus ditingkatkan. Kesepahaman dan sikap saling mendukung di forum internasional juga sudah terbangun. Meyakinkan Timor Leste bahwa Indonesia merupakan mitra yang dapat diandalkan akan menguatkan profil Indonesia dalam pandangan Timor Leste khususnya, dan di kawasan pada umumnya. Memilih Indonesia sebagai negara pertama dalam kunjungan luar negeri Presiden Guterres mencerminkan arti penting Indonesia bagi Timor Leste dan kondisi ini perlu dipertahankan.

Namun demikian, dukungan Indonesia atas keanggotaan Timor Leste tidak boleh mengabaikan cita-cita organisasi yang lebih besar. Dari uraian pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa dukungan Indonesia terhadap Timor Leste tidak cukup dan kurang tepat jika hanya dengan lobi-lobi untuk mendapatkan persetujuan negara anggota lainnya untuk menerima Timor Leste. Pemerintah Indonesia harus berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kelayakan dan

kesiapan Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN, terutama membantu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan memacu pertumbuhan ekonomi Timor Leste.

Mewujudkan komitmen dukungan yang telah disampaikan, DPR perlu mendorong dan membantu pemerintah untuk meningkatkan kerja sama yang dapat memacu penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi Timor Leste sehingga kemudian Timor Leste dapat dianggap lebih siap bergabung dan mampu mengimbangi percepatan pembangunan negara anggota lainnya. Melalui forum-forum kerja sama parlemen regional dan internasional, DPR juga dapat melibatkan Timor Leste dalam program-program peningkatan kapasitas dan kapabilitas, baik bagi anggota parlemen maupun bagi sistem pendukungnya.

Penutup

Upaya mewujudkan Komunitas ASEAN dan berlakunya Piagam ASEAN mengharuskan Timor Leste melewati proses yang lebih kompleks untuk dapat diterima menjadi Anggota ASEAN. Beban yang sudah cukup berat untuk menjalankan transformasi sesuai *roadmap* yang telah disepakati bersama membuat organisasi regional ini semakin berhati-hati dalam melakukan perluasan keanggotaan. Perluasan keanggotaan di satu sisi dapat memperbesar pengaruh organisasi, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi penghambat percepatan transformasi yang sedang dijalankan ASEAN, yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat melemahkan peran sentral ASEAN di kawasan.

Dukungan Indonesia terhadap keanggotaan Timor Leste memiliki arti penting tidak hanya bagi Timor Leste tetapi juga bagi Indonesia. Secara konsisten memberikan dukungan akan

menguatkan profil Indonesia dalam pandangan Timor Leste. Namun, dukungan Indonesia atas keanggotaan Timor Leste tidak boleh mengabaikan cita-cita organisasi yang lebih besar. Kekhawatiran sebagian anggota ASEAN harus tetap menjadi perhatian Indonesia. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dukungan yang perlu diberikan saat ini oleh pemerintah maupun DPR adalah peningkatan kerja sama yang dapat mendorong penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi Timor Leste, sehingga Timor Leste dapat dianggap lebih siap bergabung dengan ASEAN.

Referensi

“Dubes ASEAN: Timor Leste masuk ASEAN 2017”, antaranwes.com., <https://www.antaraneews.com/berita/562836/dubes-asean-timor-leste-masuk-asean-2017>, diakses 2 Juli 2018.

“Indonesia Dukung Timor Leste jadi Anggota ASEAN”, dpr.go.id., <http://dpr.go.id/berita/detail/id/21145>, diakses 2 Juli 2018.

“Menlu Sebut RI selalu Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN”, cnnindonesia.com., <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180131132539-106-272896/menlu-sebut-ri-selalu-dukung-timor-leste-jadi-anggota-asean>, diakses 2 Juli 2018.

Strating, Bec (2017). “Timor-Leste’s Critical Window on ASEAN”, lowyinstitute.org., <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/timor-leste-critical-window-asean>, diakses 2 Juli 2018.

“When Will Timor Leste Join ASEAN?”, thediplomat.com., <https://thedi diplomat.com/2016/10/when-will-timor-leste-join-asean/>, diakses 2 Juli 2018.



Rizki Roza
rizki.roza@dpr.go.id

Rizki Roza, S.Ip., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Confidence Building Measures dan Program nuklir Iran” (2010); “Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap modernisasi militer” (2013); dan “Kerjasama internasional dan Peran industri sipil dalam industri pertahanan” (2013).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.